



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASAN BASRI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **157442**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.336.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 486.000.000
3. Tanah Seluas 76250 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.612.070

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 1.528.112.070

III. HUTANG Rp. 423.727.390

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.104.384.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.